

AKSI BEIJING UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI ASIA
(Beijing Action for Disaster Risk Reduction in Asia)
29 September 2005

Konferensi Asia tentang Pengurangan Risiko Bencana (*Asian Conference on Disaster Reduction/ACDR*) diselenggarakan di Beijing, Cina, pada tanggal 27-29 September 2005 atas undangan Pemerintah Republik Rakyat Cina. Sejumlah 385 peserta menghadiri konferensi tersebut, yang meliputi delegasi dari 42 negara-negara di Asia dan Pasifik, 33 diantaranya diwakili pada tingkat kementerian, dan 13 badan PBB dan lembaga-lembaga internasional. Pertemuan tersebut diselenggarakan untuk memfasilitasi pelaksanaan hasil Konferensi Sedunia tentang Pengurangan Bencana (*World Conference on Disaster Reduction/WCDR*) yaitu Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015: Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas terhadap Bencana (*Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters/HFA*).

Para peserta menyusun Aksi Beijing untuk Pengurangan Risiko Bencana di Asia (*Beijing Action for Disaster Risk Reduction in Asia*) untuk meningkatkan kerja sama regional dalam pelaksanaan Kerangka Kerja Aksi Hyogo, seperti berikut ini.

I. Konteks

Merupakan wilayah yang paling rentan bencana di seluruh dunia dan tempat tinggal bagi sepertiga penduduk dunia, negara-negara Asia menghadapi bencana setiap tahun. Semakin meningkatnya kerentanan penduduk di Asia terutama terkait dengan kondisi demografi, perubahan teknologi dan sosial ekonomi yang sangat cepat, hebatnya perluasan urbanisasi dan pembangunan di lingkungan dengan risiko yang tinggi merupakan sebagian dari kondisi tersebut. Dampak peristiwa-peristiwa di Asia yang sangat merusak seperti seringnya topan dan badai tropis, banjir tahunan yang semakin parah, gempa bumi Bam di Iran tahun 2003, dan terutama tsunami di Samudra Hindia tahun 2004 yang menekankan kerugian hilangnya nyawa, penghidupan dan kerusakan materi. Dampak tambahan jauh melebihi kerugian sosial dan ekonomi secara langsung karena disertai dengan goncangan psikologis jangka panjang dan seringkali gangguan kesehatan umum atau lingkungan yang menyeluruh terhadap masyarakat Asia.

Dengan angka magnitude yang ada, jumlah orang-orang profesional dan fitur-fitur dinamis dari Ekonomi Asia dan posisi penting mereka pada perdagangan dan pasar dunia, tidak ada negara di dunia ini yang kebal terhadap bencana. Kekhawatiran dunia saat ini terhadap kemungkinan penyebaran penyakit pandemik ke seluruh dunia secara cepat seperti misalnya Flu Burung hanya merupakan satu contoh yang mengungkap dengan baik betapa mendesak serta perlunya investasi terus menerus dalam meningkatkan kesadaran publik secara luas tentang risiko bencana dan komitmen negara terhadap kesiapsiagaan terhadap bencana, respon dan pengurangan bencana melalui kerja sama regional.

Bencana yang berulang-ulang terjadi menjadi suatu tantangan pembangunan yang besar bagi semua negara di Asia. Dampak bencana semakin meningkat dan perlunya bantuan terhadap keadaan darurat semakin bertambah. Oleh karena itu, semakin meningkatnya bantuan untuk keadaan darurat mengurangi sumberdaya untuk biaya pembangunan. Kejadian-kejadian bencana juga membuat penduduk yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi terpuruk ke dalam kemiskinan, meningkatkan ketergantungan mereka terhadap sumberdaya alam. Pada akhirnya ini akan mengakibatkan degradasi lingkungan dan semakin lebih jauh meningkatkan kerentanan

mereka terhadap risiko bencana. Untuk mematahkan siklus negatif seperti itu dan mempertahankan pembangunan sosial ekonomi, pengurangan risiko bencana harus menjadi suatu bagian tak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan, dan nampak di semua aksi-aksi pemograman tahunan.

Sementara itu, saat ini sudah ada pemahaman yang jelas bahwa **Sasaran-Sasaran Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs)** tidak akan tercapai tanpa pertimbangan risiko bencana, dan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai kalau pengurangan risiko bencana tidak diarusutamakan ke dalam kebijakan-kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sudah secara luas diakui bahwa perspektif pengurangan bencana harus dipadukan kedalam perencanaan pembangunan setiap negara dan dalam strategi-strategi pelaksanaannya yang terkait. Kabar baiknya, teknologi sekarang memberikan kemampuan tentang dan kesempatan akan pemahaman lebih baik tentang risiko bencana dan dalam mengambil tindakan proaktif untuk mengurangi kerugian akibat bencana sebelum bencana terjadi.

Konteks ini telah mempengaruhi hasil dokumen WCDR: **Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015: Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas terhadap Bencana (*Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters/HFA*)**. Dokumen ini telah diadopsi untuk para negara anggota PBB yang turut serta dalam WCDR, yang menunjukkan komitmen global terhadap pengurangan risiko bencana dalam konteks pembangunan.

Sebagai tindak lanjut terhadap HFA, saat ini sedang berjalan sejumlah inisiatif pada tingkat nasional, regional dan internasional. Sebagai contoh, Sistem ISDR telah mengembangkan Arahan Strategis bagi Sistem ISDR untuk Mendukung Pelaksanaan Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015: Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas terhadap Bencana. Wilayah Kepulauan Pasifik telah menyusun Kerangka Kerja Aksi 2005-2015 mereka sendiri yang berjudul *An Investment for Sustainable Development in Pacific Island Countries* [Sebuah Investasi Pembangunan Berkelanjutan di Negara-Negara Kepulauan Pasifik]. Wilayah Afrika telah menetapkan sebuah Kelompok Penasehat Afrika tentang Pengurangan Risiko Bencana (*Africa Advisory Group on Disaster Risk Reduction*) dan sebuah Platform Regional Afrika tentang Platform Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (*African Regional Platform of National Platforms for Disaster Risk Reduction*) untuk melaksanakan Strategi Region Afrika dan Rencana Aksi tentang Pengurangan Risiko Bencana (*Africa Regional Strategy for and Plan of Action on Disaster Risk Reduction.*)

Di Asia, atas undangan Pemerintah Republik Rakyat Cina para pemerintah berkumpul di Beijing pada bulan Mei 2004 untuk membahas pengurangan risiko bencana sebagai persiapan WCDR. Mereka menghasilkan sebuah dokumen berjudul Deklarasi Beijing tentang Konferensi Sedunia tentang Pengurangan Bencana 2005 (*Beijing Declaration on the 2005 World Conference on Disaster Reduction*), yang menyampaikan hasil-hasil dari pertemuan-pertemuan regional yang diselenggarakan oleh ADRC, ADPC dan ASEAN.

Sejak WCDR, Komite Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) tentang Pengelolaan Bencana telah berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan HFA melalui program-program regional ASEAN untuk pengelolaan bencana. Pada bulan Agustus, negara-negara ASEAN mengadopsi kesepakatan ASEAN tentang Pengelolaan Bencana dan Respon terhadap Keadaan Darurat, lebih jauh meningkatkan kerja sama regional antar negara anggota. Komite Konsultatif Regional ADPC (RCC) untuk Pengelolaan Bencana pada bulan Mei 2005 mengadopsi pernyataan RCC5 Hanoi tentang mengarusutamakan pengelolaan risiko bencana ke dalam

pembangunan di negara-negara ASEAN, dimana para negara anggota berkomitmen untuk mengarusutamakan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Sekarang, sejak 27-29 September 2005, Pemerintah Republik Rakyat Cina telah menjadi tuan rumah sebuah “Konferensi Asia tentang Pengurangan Bencana” untuk memfasilitasi pelaksanaan hasil WCDR yaitu HFA. Para peserta telah menyusun dan dengan ini menyampaikan dokumen “Aksi Beijing untuk Pengurangan Risiko Bencana di Asia” untuk meningkatkan kerja sama regional dalam pelaksanaan HFA;

II. Tujuan Konferensi Asia Tentang Pengurangan Risiko Bencana

Konferensi tersebut memberikan suatu platform bagi negara-negara Asia untuk:

- berbagi dan saling mempertukarkan praktek-praktek terbaik dan pelajaran yang bisa dipetik dari pengurangan risiko bencana;
- memberikan rincian tentang prioritas aksi yang bisa dipertimbangkan oleh masing-masing negara untuk pelaksanaan di Asia seperti teridentifikasi dalam Kerangka Kerja Aksi Hyogo;
- meningkatkan kerja sama regional untuk pengurangan risiko bencana di Asia.

III. Rekomendasi Wilayah Prioritas dan Hasil Yang Diharapkan dari Pelaksanaan Kerangka Kerja Aksi Hyogo di Asia

HFA menetapkan tiga (3) sasaran strategis dan lima (5) wilayah prioritas dalam pengurangan risiko bencana untuk mengurangi hilangnya nyawa dan aset-aset sosial, ekonomi dan lingkungan milik komunitas dan negara-negara karena bencana. Negara-negara Asia telah membahas dan memberi penekanan pada rekomendasi prioritas untuk dicapai dalam lima wilayah prioritas HFA, dan juga memberi prioritas pada aktivitas-aktivitas dalam masing-masing lima wilayah tersebut, dengan berdasar pada kepentingan dan kebutuhan bersama semua negara Asia.

Karena pengurangan risiko bencana merupakan sebuah masalah lintas sektor yang sangat rumit, yang memerlukan pemahaman, pengetahuan, komitmen dan aksi, ia harus ditangani secara sistematis dengan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah nasional.

Sebagai satu langkah pertama menuju pengurangan risiko bencana dan mencapai pembangunan berkelanjutan, negara-negara Asia didorong untuk terus maju sesuai dengan HFA untuk mencapai hasil-hasil yang terukur dari serangkaian aktivitas yang terikat waktu (akan didaftar setelah ini), yang merupakan kepentingan mendesak semua negara Asia.

1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya

1.1 Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar disiplin dan multi pemangku kepentingan merupakan suatu keharusan dalam aksi-aksi pengurangan bencana yang efektif. Pengurangan risiko bencana merupakan sebuah masalah yang sangat rumit dan memerlukan kerjasama yang erat antar pemangku kepentingan dimana mewakili keahlian dan pengetahuan menyeluruh yang diperlukan dalam pengurangan risiko bencana dan mengarusutamakannya ke dalam perencanaan dan praktek pembangunan. Jalur-jalur komunikasi resmi dan informasi publik mengalir melalui masyarakat dari para pejabat tinggi kepada komunitas setempat yang berisiko merupakan elemen-elemen yang penting dalam koordinasi dan kolaborasi luas yang efektif. Dalam dua dekade terakhir, di semua negara Asia telah meningkat pemahaman tentang perlunya pendekatan yang sistematis terhadap

pengurangan bencana. Ini memperkuat kebutuhan kuat untuk *membentuk atau meningkatkan platform nasional untuk pengurangan risiko bencana*.

1.2 Membangun ketahanan bangsa dan komunitas merupakan tanggung jawab utama pemerintah nasional dan para pemimpin komunitas setempat. Keterlibatan pemerintah nasional dan para pemimpin komunitas setempat secara terus menerus penting dalam memberikan arahan dan komitmen politik, untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan yang diperlukan dan untuk mendorong kepemilikan nasional dan lokal terhadap proses-proses pengurangan risiko bencana. Adanya kebijakan dan perundangan nasional yang tepat untuk pengurangan risiko bencana pada tingkat nasional dan lokal menunjukkan sebuah komitmen pemerintah nasional untuk mencapai pengurangan risiko bencana dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Lembaga-lembaga masyarakat sipil dan jaringan tenaga sukarela seperti Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional sama pentingnya dalam menumbuhkan kesadaran dan tindakan-tindakan untuk membentuk komunitas yang lebih bisa bertahan. Kepemilikan nasional dan lokal keduanya memungkinkan respon-respon yang nyata dan efektif terhadap kebutuhan-kebutuhan dan realitas nasional dan lokal tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi proaktif aktivitas di semua tingkat. Oleh karena itu, pemerintah nasional didorong untuk mengambil tindakan lebih jauh untuk *mengembangkan dan mengkaji kebijakan-kebijakan dan perundangan tentang pengurangan risiko bencana di semua tingkat dan meningkatkan kepemilikan proses-proses pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan lokal*.

1.3 Penyediaan sumberdaya secara kontinyu untuk pengurangan risiko bencana merupakan sebuah investasi untuk pembangunan berkelanjutan. Kurangnya pemahaman tentang pengurangan risiko bencana saat ini mengakibatkan terbatasnya komitmen untuk mengalokasikan sumberdaya untuk mengurangi kerentanan komunitas terhadap bencana. Ini sebagian karena meningkatnya dampak bencana dan diperburuk oleh kebutuhan bantuan kemanusiaan yang melambatkan pencapaian pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah. Oleh karena itu, ketika merencanakan sasaran-sasaran pembangunan negara, pemerintah nasional didorong untuk *melakukan investasi sumberdaya yang memadai untuk pengurangan risiko bencana dengan aktivitas di semua tingkat dan selain itu untuk memobilisasi sumberdaya eksternal melalui kerja sama bilateral dan multilateral*.

2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini

2.1 Mengkaji dan mengkomunikasikan risiko bencana kepada para pengambil keputusan dan penduduk yang berisiko merupakan kerangka kerja dasar kesiapsiagaan terhadap bencana dan pengurangan risiko. Mengkaji risiko bencana dan mengkomunikasikan hasilnya pada semua masyarakat terkait yang berperan dalam koordinasi dan kolaborasi yang efisien dan efektif antar para penyusun kebijakan, para pendidik, praktisi pembangunan dan manajer bencana. Hasil dari sebuah pengkajian risiko bencana sangat penting dalam pengambilan keputusan dan kesadaran publik dalam mengarusutamakan pengurangan risiko ke dalam praktek pembangunan, dan dalam peringatan dini bencana, kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana. Oleh karena itu, *pengkajian dan komunikasi risiko dianggap sebagai isu utama bagi pemerintah nasional dalam penyusunan pengurangan risiko bencana mereka*. Dalam hal ini, para pemerintah dihimbau untuk mempertimbangkan aspek-aspek kebijakan, hubungan kelembagaan dan kapasitas teknis yang diperlukan dalam pengkajian risiko.

2.2 Mengembangkan sistem peringatan dini penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana, yang mengakibatkan berkurangnya kerugian nyawa dan sosial ekonomi. Sudah ada lebih banyak upaya untuk meningkatkan sistem peringatan dini di seluruh kawasan, dengan fokus kuat pada aspek teknis dan ilmiah. Namun ada kebutuhan untuk menanggapi pentingnya dimensi manusia dalam peringatan dini, dan bagaimana informasi yang relevan dapat dikomunikasikan dan dipadukan lebih baik ke dalam pencegahan bencana, kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana. Ini penting bagi keefektifan peringatan dini bencana karena upaya harus memastikan bahwa penduduk yang menghadapi risiko mampu untuk menerima, memahami dan bertindak untuk melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, lebih banyak perhatian dan upaya direkomendasikan untuk *menghubungkan semua aktor-aktor utama yang diperlukan bagi sistem peringatan dini yang lebih baik, termasuk para politisi, ilmuwan, penyedia informasi dan penduduk yang menghadapi risiko.*

3. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat.

3.1 Memadukan pengurangan risiko bencana ke dalam sistem pendidikan formal dan informal merupakan investasi menguntungkan dalam merubah pikiran, sikap dan perilaku orang dalam mengurangi risiko bencana. Pengurangan risiko bencana penting sekali dalam pembangunan sosial ekonomi. Oleh karenanya, memperkenalkan pengurangan risiko bencana dalam sistem pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang bagi pembangunan berkelanjutan. Dalam jangka pendek, ia membantu untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan di semua kelompok gender dan umur yang berbeda. Pemerintah nasional diimbau untuk mengambil tindakan segera dalam *memperkenalkan pengurangan risiko bencana kedalam program-program pendidikan formal dan informal dan upaya pelatihan-pelatihan terkait, memberikan perhatian semestinya dalam transfer dan penggunaan kearifan tradisional dan pengetahuan lokal.*

3.2. Mengarusutamakan pengurangan risiko bencana kedalam pembangunan berkelanjutan memerlukan pemahaman, pengetahuan dan keahlian yang memadai diantara para pembuat keputusan, para praktisi dan komunitas yang menghadapi risiko. Pelatihan jangka pendek tentang pengurangan risiko bencana merupakan suatu cara efektif dalam melengkapi penduduk dengan pengetahuan mendasar dan keahlian yang diperlukan dalam mengarusutamakan pengurangan risiko bencana ke dalam hidup mereka sehari-hari. Perlunya pelatihan seperti itu dirasa sangat besar diantara para praktisi pembangunan dan manajer bencana yang merupakan pemain kunci dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana pada tingkat nasional dan komunitas. Untuk menanggapi kebutuhan yang begitu besar akan adanya pelatihan yang efektif, para pemerintah didorong untuk memobilisasi institusi-institusi akademis dan pelatihan untuk merancang dan melaksanakan kursus-kursus pelatihan yang menangani kebutuhan sesungguhnya komunitas yang berisiko. Oleh karena itu, *pelatihan para pembuat keputusan, praktisi dan pemimpin komunitas segera diperlukan demi keberhasilan pelaksanaan pengurangan risiko bencana.*

3.3 Berbagi informasi dan mempertukarkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana membangun kapasitas dan budaya keselamatan. Ini tidak mudah di Asia karena keragaman sosial budaya dan bahasanya yang besar, yang membawa tantangan terhadap pertukaran dan penyebaran informasi bahkan dalam sebuah negara. Untuk menghadapi tantangan pada tingkat nasional dan komunitas, para pemerintah nasional diimbau untuk bekerja bersama para pemangku kepentingan utama dan elemen-elemen masyarakat sipil yang sudah bekerja pada tingkat komunitas untuk melakukan upaya-upaya untuk

mendukung dan menciptakan cara-cara untuk *meningkatkan pembagian informasi dan pertukaran pengetahuan*. Perhatian khusus harus diberikan dalam keterlibatan media siar dan cetak dalam berbagai bahasa.

4. Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasari

4.1 Menangani pengurangan risiko bencana dalam proses pembangunan sosial ekonomi merupakan suatu situasi yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah dan penduduk dalam komunitas. Kebijakan dan program pembangunan sosial ekonomi belum secara memadai mempertimbangkan risiko bencana. Meningkatkan ketahanan aset dan investasi pembangunan akan memberikan keuntungan sosial ekonomi yang berarti. Kebutuhan akan bantuan darurat dengan demikian berkurang dan akan meningkatkan ketersediaan sumberdaya untuk mengejar pembangunan dan pada saat yang bersamaan memberikan cara-cara yang sangat efektif dari segi biaya untuk mempercepat bantuan pada waktu diperlukan. Penting bahwa perspektif dan upaya pengurangan risiko bencana dimasukkan dalam semua sektor rencana pembangunan nasional dan strategi pelaksanaannya. Mengingat pentingnya bagi pembangunan berkelanjutan dan potensi pertumbuhan nasional, perhatian khusus harus diberikan dalam bidang lingkungan, infrastruktur, hunian, pertanian, penggunaan lahan dan pengelolaan sumberdaya air dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah nasional dihimbau untuk melakukan tindakan serius untuk *mengarusutamakan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan*.

4.2 Meningkatkan ketahanan fasilitas-fasilitas dan infrastruktur penting tidak terpisahkan dari perwujudan kebijakan dan program-program pengurangan risiko bencana. Perlindungan fasilitas-fasilitas penting seperti sekolah dan RS merupakan suatu bagian tak terpisahkan dalam proses pengurangan risiko bencana. Fasilitas-fasilitas yang mempunyai nilai budaya setempat atau keagamaan juga mempunyai nilai penting yang besar bagi motivasi komunitas dan sebagai perlindungan dalam situasi darurat. Demikian juga, infrastruktur fisik seperti transportasi, fasilitas komunikasi, hunian dan lingkungan terbangun dapat ditengarai untuk secara khusus dilindungi. Penting untuk *mempertahankan kemampuan aset sosial dan ekonomi tersebut dalam memberikan pelayanan, serta dalam memastikan ketersediaannya yang tak terputus dalam saat krisis untuk mendukung penyediaan pelayanan darurat ketika diperlukan*.

4.3 Menggalakkan integrasi pengurangan risiko bencana terkait dengan iklim ke dalam adaptasi perubahan iklim pada tingkat nasional dan komunitas membantu meningkatkan keefektifan sumberdaya manusia dan keuangan dan mengurangi kemungkinan hilangnya sumberdaya-sumberdaya tersebut di masa mendatang. Baik adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana merupakan permasalahan pembangunan yang mempunyai tujuan serupa dalam membangun masyarakat yang mempunyai ketahanan. Selain itu, dua hal tersebut menghadapi kerumitan dan tantangan serupa dan menggantungkan pada jenis-jenis tindakan yang sama seperti peringatan dini, data tentang bencana, pengkajian risiko dan kerentanan, pengelolaan risiko daerah perkotaan, dan kebijakan. Pengurangan risiko bencana telah dianggap sebagai alat yang harus digunakan tanpa kompromi dalam usaha mengadaptasi perubahan iklim dan memilih strategi adaptasi yang dapat dengan cepat mengeluarkan kondisi yang sama-sama menguntungkan. Oleh karenanya, *menggalakkan integrasi pengurangan risiko bencana yang terkait dengan perubahan iklim ke dalam adaptasi perubahan iklim mengurangi dampak ganda perubahan cuaca dan bencana pada penduduk dan masyarakatnya*.

4.4 Meneruskan upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan investasi memerlukan integrasi keduanya dengan pengurangan risiko bencana. Kemiskinan mengakibatkan penduduk yang hidup dalam wilayah-wilayah rentan bahaya menjadi lebih rentan terhadap dampak bencana, dan melemahkan kapasitas penduduk untuk bertahan selama dan setelah peristiwa bencana. Oleh karena itu, kondisi terpuruk dalam kemiskinan menciptakan risiko bencana yang semakin besar, yang akan membawa ke keterpurukan lebih dalam lagi ke dalam kemiskinan. Dengan membuat upaya pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari strategi pengurangan risiko, pemerintah dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kaum miskin, mematahkan siklus negatif dan berperan dalam lebih banyak upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Penggunaan varietas tanaman yang lebih toleran dan praktek bercocok tanam yang lebih sensitif terhadap lingkungan merupakan contoh-contoh tindakan-tindakan sederhana untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pengurangan bencana pada saat yang sama. Memasukkan tindakan-tindakan pengurangan risiko bencana ke dalam strategi dan aksi pengentasan kemiskinan merupakan kunci untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Oleh karenanya pemerintah nasional dihimbau untuk *mengintegrasikan pengurangan risiko bencana kedalam strategi-strategi dan program-program pengentasan kemiskinan.*

4.5 Mengintegrasikan tindakan-tindakan pengurangan risiko selama bantuan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana memerlukan pemahaman, pengetahuan dan keahlian yang baik tentang pengurangan risiko bencana diantara para pekerja kemanusiaan dan lainnya yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini merupakan persyaratan untuk memastikan keselamatan penduduk di wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana dan mencegah agar mereka tidak terpapar bencana lebih lanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, pemerintah nasional dihimbau untuk melakukan upaya semampunya untuk *meningkatkan ketahanan semua aset yang sudah dibangun kembali terhadap bahaya dan memadukan pengurangan risiko bencana ke dalam respon bencana dan aktivitas pemulihan.* Aksi-aksi semacam itu dapat meningkatkan manfaat jangka panjang adanya bantuan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat

5.1 Pengembangan rencana kontinjensi yang relevan pada saat ini serta menjadikan rencana itu tersedia merupakan tindakan-tindakan penting dalam kesiapsiagaan terhadap bencana dan respon yang efektif pada tingkat regional, nasional, sub-nasional dan komunitas. Praktek-praktek terbaik yang ada menunjukkan bahwa rencana kontinjensi membantu baik para manajer bencana dan pekerja bantuan darurat untuk bisa merespon lebih baik terhadap bencana dan berperan dalam mengurangi korban jiwa dan penderitaan. Namun demikian, kebanyakan negara di Asia belum melibatkan diri dalam pengembangan rencana kontinjensi, ataupun mengembangkan insentif untuk mendorong pengembangan dan penerapannya secara lebih luas. Oleh karena itu, laporan-laporan menyebutkan bahwa bantuan darurat dan aktivitas koordinasi di wilayah-wilayah yang terkena bencana tidak memadai dan kurang efektif. Untuk mengurangi korban jiwa dan penderitaan, para pemerintah nasional dihimbau untuk *mempersiapkan, mengkaji, dan merubah rencana kontinjensi secara rutin demi respon bencana yang efisien dan efektif pada tingkat komunitas dan nasional.* Perencanaan kontinjensi bersama pada khususnya penting dalam mempersiapkan respon terhadap bencana lintas batas berskala besar yang mungkin melebihi kapasitas nasional.

5.2 Sebagai kawasan yang paling padat penduduk dan paling rentan bahaya di seluruh dunia membuat penduduk Asia rentan terhadap risiko bencana yang parah. Ini artinya setiap bencana berdampak pada sejumlah besar penduduk dan terus menjadi tantangan bagi kapasitas respon keadaan darurat yang ada. Oleh karena itu, sambil menggalakkan pengurangan risiko bencana, pemerintah nasional dihimbau untuk menyediakan sumberdaya untuk meningkatkan kapasitas baik para pegawai pemerintah maupun pemimpin komunitas dalam koordinasi dan manajemen respon bencana. *Dengan melengkapi mereka dengan keahlian dan alat-alat untuk melakukan pengkajian kerusakan dan analisa kebutuhan, kemampuan respon terhadap keadaan darurat pada tingkat lokal dapat ditingkatkan secara signifikan.*

IV. Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Tingkat Nasional

Pada pertemuan meja bundar tingkat tinggi, para menteri dan kepala delegasi lainnya memberikan informasi kepada para peserta konferensi tentang inisiatif inovatif di negara mereka masing-masing dalam mengembangkan pengurangan risiko bencana dalam konteks HFA. Hal tersebut akan diringkas pada lampiran prosiding konferensi.

Para pemerintah nasional dihimbau untuk menyusun Rencana Aksi mereka sendiri sesuai dengan prioritas nasional untuk pelaksanaan Kerangka Kerja Aksi Hyogo dan untuk membuat sebuah mekanisme nasional untuk melakukan kajian berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi tersebut. Pada akhirnya, ini mestinya menggerakkan sebuah proses bagi pengembangan satu rangkaian indikator yang disepakati bersama untuk mengukur kemajuan yang dicapai pada tingkat lokal, nasional, dan regional.

V. Mekanisme Kerja Sama Regional Untuk Pelaksanaan dan Tindak Lanjut

Di Asia, telah ada sejumlah mekanisme dan kapasitas regional yang tersedia untuk mendukung dan memfasilitasi pengurangan risiko bencana dan respon pada tingkat nasional dan komunitas. Telah diakui, diterima dan dihargai di region dan lebih dari itu mekanisme-mekanisme tersebut berperan dalam menggalakkan konsep pengurangan risiko bencana dan meningkatkan kapasitas para pejabat Pemerintah Nasional dan para pemimpin komunitas. Sejumlah mekanisme khusus yang berorientasi pengurangan bencana juga telah dibentuk, seperti misalnya Pusat Kesiapsiagaan terhadap Bencana Asia (*Asian Disaster Preparedness Center/ADPC*), Pusat Pengurangan Bencana Asia (*Asian Disaster Reduction Center ADRC*), Komite Taifun dan Panel untuk Badai Tropis (*Typhoon Committee and the Panel on Tropical Cyclones*). Dan sejumlah inisiatif kerja sama tingkat sub-regional, seperti misalnya Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (*Association of South East Asian Nations/ASEAN*), Pusat Internasional untuk Pembangunan Pegunungan Terpadu (*International Center for Integrated Mountain Development/ICIMOD*), Komisi Sungai Mekong (*Mekong River Commission/ MRC*), Asosiasi untuk Kerja Sama Kawasan Asia Selatan (*South Asian Association for Regional Cooperation/ SAARC*), dan juga World Bank dan Asian Development Bank (ADB) telah bekerja dan bersedia mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana pada tingkat nasional.

Asia telah menjadi tuan rumah untuk sejumlah kantor PBB untuk tingkat regional, lembaga-lembaga internasional dan bilateral. Karena ia jug merupakan kawasan yang paling rentan terhadap bencana, banyak dari institusi tersebut yang bekerja keras untuk menggalakkan dan mendukung pengurangan risiko bencana dan untuk mengarusutamakan program-program terkait di berbagai tingkat aktivitas. Para pemerintah nasional dihimbau untuk meraih kerja sama lebih lanjut dan kolaborasi lebih luas dengan organisasi-organisasi semacam itu sehingga semua sumberdaya yang tersedia dapat digunakan dengan cara yang paling produktif. Negara-negara

Asia mungkin berniat untuk bekerja bersama dengan elemen-elemen Sistem PBB, terutama mengingat bahwa kantor-kantor regional Program Pembangunan PBB (*UN Development Programme/UNDP*), Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana (*International Strategy for Disaster Reduction/ ISDR*) dan Kantor untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (*Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA*) yang mempunyai mandat gabungan untuk melakukan koordinasi pengurangan risiko bencana, peningkatan kapasitas dan respon. Kesempatan-kesempatan lain untuk memfasilitasi pelaksanaan “Aksi Beijing untuk Pengurangan Risiko Bencana” dan pemantauan atas pencapaiannya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang bisa diterapkan dengan ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) sebagai suatu mekanisme regional.

Untuk melaksanakan Kerangka Kerja Aksi Hyogo, mekanisme yang sudah ada tersebut dapat lebih diperkuat, termasuk memperluas bidang pelayanan mereka. Upaya-upaya juga harus dilakukan untuk menggali kemungkinan membangun kapasitas pendukung teknis tingkat regional/sub-regional dan fasilitas untuk membantu membangun ketahanan bangsa dan komunitas. Dalam proses-proses tersebut, para pemerintah nasional dihimbau untuk bekerja erat dengan organisasi internasional terkait, lembaga-lembaga pembangunan, bantuan teknis dan pendanaan, dan untuk mendapatkan manfaat dan kesempatan yang ditawarkan oleh mekanisme lain yang ada.

Direkomendasikan bahwa negara-negara Asia mengambil manfaat dari konferensi antar pemerintahan tentang pengurangan risiko bencana yang akan dilakukan di tahun-tahun mendatang, seperti misalnya pertemuan yang diselenggarakan oleh ADPC, ADRC, ACDM dan lainnya untuk membahas kemajuan yang sudah dicapai.

Pemerintah Republik India telah menawarkan untuk menjadi penyelenggara Konferensi Asia Kedua tentang Pengurangan Bencana di tahun 2007 atau tahun lain yang sesuai dengan para negara peserta. Ini akan memberikan kesempatan yang baik untuk meninjau kemajuan yang sudah dicapai dalam pelaksanaan lebih lanjut Kerangka Kerja Aksi Hyogo dan Aksi Beijing untuk Pengurangan Risiko Bencana di Asia.

Ucapan Terima Kasih

Para peserta Konferensi Asia untuk Pengurangan Bencana (ACDR) mengucapkan penghargaannya kepada Pemerintah Republik Rakyat Cina yang telah menjadi tuan rumah konferensi tingkat menteri ini. Merupakan suatu kesempatan yang produktif untuk bisa menegaskan komitmen politis para pengambil keputusan di Asia dan Pasifik untuk memajukan proses-proses pengurangan risiko bencana di negara mereka masing-masing melalui pertukaran informasi, pengalaman dan inisiatif mereka secara kolaboratif. Para peserta ACDR menghargai pengalaman Cina yang lama dan luas dalam memahami, mengkaji dan melakukan mitigasi terhadap bencana dan mengambil manfaat dari kesempatan ini untuk belajar dari pengetahuan dan pengalaman yang kaya ini.

Para peserta melihat adanya proposal dan usulan inisiatif yang digambarkan oleh negara penyelenggara dan negara peserta lainnya untuk upaya-upaya kerja sama regional di masa mendatang yang akan memajukan pengurangan risiko bencana bagi penduduk Asia, dan menghimbau agar proposal-proposal tersebut dipertimbangkan lebih lanjut.